

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang menyebabkan pendapatan penduduk suatu wilayah meningkat dalam jangka panjang, sehingga dikatakan bahwa pembangunan ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan struktur ekonomi dan kelembagaan. Keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah selalu menetapkan target laju pertumbuhan ekonomi didalam perencanaan dan tujuan pembangunannya. Indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan suatu daerah adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dilihat dari perkembangan PDRB suatu daerah.

Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang meningkat apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya (Caska,2008). Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi mampu mendorong terciptanya pembangunan disegala aspek masyarakat, baik berupa infrastruktur, perbaikan pelayanan publik serta aspek yang mendasar dalam hidup manusia yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat (Alfarabi dkk,2014).

Untuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat juga diperlukan kontribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak diimbangi pemerataan, akan menimbulkan ketimpangan suatu wilayah.

Ketimpangan wilayah (*regional disparity*) tersebut, terlihat dengan adanya wilayah maju dengan wilayah yang terbelakang atau kurang maju. Ketimpangan pada awalnya dapat disebabkan oleh adanya perbedaan suatu kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah, program yang dikembangkan untuk mengurangi ketimpangan antardaerah selama ini belum mencapai hasil yang memadai (Mahardiki Dkk,2013).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Arsyad, 2010). Proses Pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan secara optimal.

Pembangunan tidak selalu mengalami pemerataan. Beberapa daerah dapat mengalami pertumbuhan yang cepat, sedangkan daerah lain juga dapat mengalami pertumbuhan yang lebih lambat. Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti pemerataan ekonomi akan memperlebar jurang pemisah antara satu dengan yang lainnya, sementara pemerataan ekonomi tanpa pertumbuhan ekonomi sama halnya dengan meningkatkan kemiskinan suatu daerah. Pertumbuhan yang tidak merata dan ketimpangan pembangunan merupakan kondisi mayoritas pembangunan daerah di Indonesia saat ini. Daerah yang tidak mengalami kemajuan disebabkan karena kurangnya sumber daya yang dimiliki, adanya kecenderungan investor memilih daerah yang memiliki

fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, telekomunikasi, dll (Mopangga, 2011).

Jawa Tengah merupakan Provinsi di Pulau Jawa yang tidak lepas dari permasalahan ketidakmerataan pertumbuhan. Melalui Perda Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, Pemerintah Provinsi membentuk kawasan kerjasama. Tujuan dibentuknya kerjasama ini agar satu kawasan saling bekerjasama dan berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta untuk meningkatkan pemerataan pembangunan.

Kabupaten Blora berada dalam kawasan eks-Karesidenan Pati terdiri dari Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora yang juga memiliki ketidakmerataan dalam pembangunan daerahnya. Eks-Karesidenan Pati ini sering disebut sebagai daerah Banglor yang sering dijadikan sebagai tolak ukur atau pembanding kemajuan dan perkembangan dari daerah yang ada dibawahnya.

Tabel 1.1
Perbandingan PDRB tahun 2015

Kabupaten	ADHK	Kotribusi
Grobogan	15,98	1,99
Blora	12,88	1,61
Rembang	10,85	1,36
Pati	24,78	3,13
Kudus	65,18	8,37
Jepara	17,20	2,17

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (2015)

Menurut Badan Pusat Statistik Blora (2016) Kabupaten Blora memiliki nilai PDRB terkecil setelah Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya. Tahun 2015 Kontribusi PDRB Kabupaten Blora hanya 1,61 % Terhadap total PDRB Jawa Tengah. Kontribusi PDRB Kabupaten Blora menempati peringkat 25 dari 35 Kabupaten/Kota. perbedaan tingkat pembangunan antar kecamatan Kabupaten Blora yang dipengaruhi perbedaan potensi tiap kecamatan menyebabkan tingkat pendapatan yang berbeda pula. Identifikasi dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto perkecamatan Kabupaten Blora.

Tabel I.2
PDRB Kabupaten Blora dirinci Menurut Lapangan Usaha ADHK 2010
Tahun 2011-2015 (Juta rupiah)

Kecamatan	2011	2012	2013	2014	2015
Jati	327,300.41	336,183.83	347,443.36	352,015.30	365,291.24
Randublatung	776,157.01	805,108.61	837,262.92	851,172.31	884,658.95
Kradenan	311,185.91	321,031.06	331,631.88	335,504.96	352,080.16
Kedungtuban	529,378.56	544,543.56	566,993.82	571,738.94	594,539.14
Cepu	2,857,494.87	3,019,830.41	3,228,199.56	3,414,177.15	3,696,728.36
Sambong	196,515.69	200,002.01	207,445.81	210,328.91	218,661.34
Jiken	226,976.52	235,759.03	243,686.43	250,141.95	259,550.48
Bogorejo	180,001.12	187,980.17	194,505.57	198,056.46	206,427.55
Jepon	548,828.45	573,911.99	606,223.11	638,461.55	658,953.89
Blora	1,743,905.20	1,853,057.26	1,972,055.48	2,103,914.72	2,220,664.76
Banjarejo	337,467.31	348,000.67	362,295.63	373,370.51	388,268.90
Tunjungan	466,286.80	500,998.40	528,812.48	558,808.24	577,516.98
Japah	260,818.29	272,071.85	280,905.04	283,864.62	294,072.87
Ngawen	740,782.04	781,739.38	820,647.06	866,170.30	900,954.36
Kunduran	698,778.18	728,233.70	760,083.14	784,953.04	811,441.68
Todanan	395,846.68	408,413.95	424,313.56	434,522.33	452,774.04
PDRB	10,597,723.04	11,116,865.88	11,712,504.85	12,227,201.29	12,882,584.70

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora (dalam angka)

Dari data Produk Domestik Regional Bruto perkecamatan Kabupaten Blora atas dasar harga konstan. Dapat disimpulkan bahwa kecamatan Blora dan Cepu memiliki nilai PDRB terbesar dibandingkan PDRB kecamatan yang lainnya. PDRB terbesar dimiliki oleh kecamatan Cepu Rp 3,696,728.36 pada tahun 2015 dengan laju pertumbuhan sebesar 8,28 %. Sedangkan Kecamatan Bogorejo memiliki nilai PDRB paling rendah sebesar Rp 206,427.55 tahun 2015 dengan laju pertumbuhan 4,23 %, secara keseluruhan bahwa PDRB kabupaten Blora selalu mengalami peningkatan dari tahun 2011-2015, namun terdapat perbedaan tingkat PDRB antar kecamatan dengan jarak yang cukup lebar.

Tabel 1.3
Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Blora Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2011-2015

Lapangan Usaha		2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-4,40	2,03
B	Pertambangan dan Penggalian	5,08	12,69
C	Industri pengolahan	14,46	-0,82
D	Pengadaan Litrik dan Gas	3,22	-2,83
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah Limbah dan Daur Ulang	4,89	2,25
F	Konstruksi	4,99	7,34
G	Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,61	5,97
H	Transportasi dan Pergudangan	10,57	7,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,00	7,33
J	Informasi dan Komunikasi	13,03	8,17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,99	6,58
L	Real Estate	8,82	6,94
M,N	Jasa Perusahaan	10,60	8,06
O	Administrasi pemerintah, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,14	5,99
P	Jasa Pendidikan	12,76	5,67
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,19	7,07
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8,59	4,04
Produk Domestik Regional Bruto		4,39	5,36

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Blora

Dengan melihat Tabel 3 diatas Laju Pertumbuhan Kabupaten Blora tahun 2015 mencapai 5,36 %. Lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 dengan pertumbuhan 4,39%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 12,69%. Lapangan Usaha Industri Pengolahan dan Lapangan Usaha pengadaan listrik dan Gas merupakan lapangan usaha yang mengalami kontraksi (pertumbuhan ekonomi negative) yaitu sebesar -0,82% dan -2,83 % .

Dilihat dari laju pertumbuhan diatas, Kabupaten Blora termasuk klasifikasi daerah yang masih bisa berkembang pesat, maka pembangunan, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Blora masih belum merata seluruhnya. Dengan indikasi pembangunan ekonomi yang belum merata maka bisa dikatakan adanya ketimpangan. Ketimpangan ini dapat terjadi karena perbedaan pemopang utama perekonomian maupun perbedaan sektor basis di tiap kecamatan di Kabupaten Blora

Kabupaten Blora memiliki 16 Kecamatan yang terdiri dari kecamatan Jati, Randublantung, Kradenan, Kedungtuban, Cepu, Sambong, Jiken, Bogorejo, Jepon, Blora, Banjarejo, Tunjungan, Japah, Ngawen, Kunduran, dan Todanan. Dengan jumlah kecamatan yang terbilang cukup banyak, maka pemerintah daerah Kabupaten Blora memiliki tugas berat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar masyarakat Kabupaten Blora mencapai pemerataan ekonominya. Terjadinya ketimpangan di Kabupaten Blora merupakan suatu hal yang perlu dicermati. Ketimpangan antar kecamatan disebabkan oleh adanya perbedaan sumber daya alam dan perbedaan tingkat pembangunan yang akan

membawa dampak perbedaan kemakmuran antar kecamatan. Untuk itu perlu diadakan pengkajian atau analisis ketimpangan regional agar dapat diketahui arah pertumbuhan ekonomi, dan perlu adanya kebijakan yang berupa pemanfaatan sektor-sektor basis dari masing-masing kecamatan untuk memajukan perekonomian daerah guna mengurangi ketimpangan yang terjadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pertumbuhan ekonomi antar kecamatan dikabupaten Blora tahun 2011-2015?
2. Bagaimana klasifikasi pola pertumbuhan ekonomi masing-masing kecamatan di Kabupaten Blora dari tahun 2011-2015 ?
3. Bagaimana tingkat ketimpangan regional antar kecamatan di Kabupaten Blora dari tahun 2011-2015?
4. sektor basis apa yang dimiliki masing-masing kecamatan di Kabupaten Blora pada tahun 2011-2015 berdasarkan analisis *Location Quotient* (LQ)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi antar kecamatan dikabupaten Blora tahun 2011-2015?
2. Untuk mengetahui pengkasifikasi pola pertumbuhan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Blora dari tahun 2011-2015 ?

3. Untuk mengetahui tingkat ketimpangan regional antar kecamatan di Kabupaten Blora dari tahun 2011-2015 ?
4. Untuk mengetahui sektor basis yang dimiliki masing-masing kecamatan di kabupaten Blora pada tahun 2011-2015 berdasarkan analisis *Location Quotient* (LQ)?

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi pihak Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan mampu menerapkan kebijakan-kebijakan perekonomian yang lebih terencana dengan baik. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan untuk mengatasi masalah ketimpangan regional dan mengembangkan potensi sektor basis di Kabupaten Blora. Agar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora akan lebih berkualitas.

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan terutama masyarakat Kabupaten Blora dapat memberikan tambahan informasi dengan keadaan daerah dan pembangunan ekonomi di daerah mereka, sehingga masyarakat dapat berperan lebih aktif lagi untuk bersama memajukan Kabupaten Blora.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Sebagai referensi bagi pihak lain yang ingin mengadakan penelitian dibidang yang sama.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder, secara berkala yang berbentuk runtutan waktu (Time Series). Untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu. Data yang digunakan adalah data sekunder selama 5 tahun dari tahun 2011-2015 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora serta literature lain yang mendukung dalam penulisan ini.

2. Metode Analisis Data

a. Analisis laju pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Blora pada tahun 2011-2015. Pertumbuhan ekonomi dinyatakan sebagai perubahan PDRB atas dasar harga konstan masing-masing kecamatan di Kabupaten Blora pada tahun 2011-2015 dengan satuan persen. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut (Munandar, 2015):

$$\text{Growth} = \frac{GDP_t - GDP_{t-1}}{GDP_{t-1}} \times 100$$

Keterangan :

Growth = Pertumbuhan ekonomi

GDP_t = Gross Domestic Product pada tahun t

GDP_{t-1} = Gross Domestic Produk pada tahun Sebelum tahun t

b. Analisis Tipologi Klassen

Alat analisis Tipologi Klassen untuk mengidentifikasi sektor, subsektor, usaha atau potensi-potensi yang terdapat di Kabupaten Blora. Tipologi Klassen digunakan melalui pendekatan sektoral yang mendasarkan pengelompokkan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB kabupaten/kota dan yang kedua adalah dengan pendekatan wilayah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita daerah. Analisis ini menghasilkan 4 (empat) klasifikasi dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut (Mopangga, 2011) :

Tabel 1.4
Klasifikasi Klassen tipologi pertumbuhan ekonomi

y	$y_i > y$	$y_i < y$
r		
$r_i > r$	Quadran I Daerah maju dan cepat tumbuh	Quadran II Daerah maju tapi tertekan
$r_i < r$	Quadran III Daerah berkembang pesat	Quadran IV Daerah relatif terbelakang

Keterangan:

r_i : Laju pertumbuhan ekonomi kecamatan i

y_i : PDRB perkapita Kecamatan i

r : rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora

y : rata-rata PDRB perkapita Kabupaten Blora

3. Analisis Ketimpangan regional

a. Indeks Williamson

Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar kecamatan yang terjadi di Kabupaten Blora dapat dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional in equality*) yang dinamakan indeks ketimpangan williamson.

Adapun rumus indeks Williamson adalah sebagai berikut (Barika, 2012):

$$IW = \sqrt{\frac{\sum(Y_i - \bar{Y})^2 \cdot f_i / N}{\bar{Y}}}$$

Keterangan :

IW	=	Indeks Williamson
Y_i	=	PDRB perkapita di kecamatan i
\bar{Y}	=	PDRB perkapita rata-rata Kabupaten Blora
f_i	=	Jumlah Penduduk Kecamatan i
N	=	Jumlah Penduduk Kabupaten Blora

b. Indeks Ketimpangan Entropi Theil

Selain menggunakan indeks Williamson, dalam mengukur suatu ketimpangan pendapatan di Kabupaten Blora menggunakan indeks entropi theil. Menurut Kuncoro (2001) konsep Entropi theil dari suatu distribusi pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan dan konsentrasi industri.

Adapun rumus Indeks Ketimpangan Entropi Theil adalah sebagai berikut (Wicaksono, 2010);

$$I(y) = \sum (y_i/Y) \cdot \log[(y_i/Y)/(x_i/X)]$$

Keterangan:

- $I(y)$ = Indeks ketimpangan Entropi Theil
 y_i = PDRB per kapita masing-masing kecamatan
 Y = Rata-rata PDRB per kapita Kabupaten Blora
 x_i = Jumlah penduduk kecamatan
 X = Jumlah penduduk Kabupaten Blora

c. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Location Quotient merupakan suatu pendekatan tidak langsung yang digunakan untuk mengukur kinerja sektor basis ekonomi suatu daerah (Arsyad, 2010). Untuk mengukur sektor basis yang ada di Kabupaten Blora menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ). Untuk mengetahui sektor basis digunakan LQ dengan formulasi sebagai (Utama, 2011):

$$LQ = \frac{Si/S}{Ni/N}$$

Keterangan:

- S_i = Nilai tambah sektor i di kecamatan Blora
 S = Total PDRB di kecamatan Blora
 N_i = Nilai tambah sektor i di Kabupaten Blora
 N = Total PDRB di Kabupaten Blora

Berdasarkan formulasi yang ditunjukkan dalam persamaan di atas, maka ada tiga kemungkinan nilai LQ yang dapat diperoleh:

- a. Nilai $LQ = 1$. Ini berarti bahwa tingkat spesialisasi sektor i di Kecamatan tertentu adalah sama dengan sektor yang sama dalam perekonomian kabupaten Blora
- b. Nilai $LQ > 1$. Ini berarti bahwa tingkat spesialisasi sektor i di Kecamatan tertentu lebih besar dibandingkan dengan sektor yang sama dalam perekonomian kabupaten Blora.
- c. Nilai $LQ < 1$. Ini berarti bahwa tingkat spesialisasi sektor i di kecamatan tertentu lebih kecil dibandingkan dengan sektor yang sama dalam perekonomian Kabupaten Blora

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi menjadi lima bab dengan urutan penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Pada Bab ini berisi teori-teori yang mendukung Penelitian ini yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi, Pembangunan ekonomi, hubungan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, PDRB, Hubungan

Pertumbuhan dengan ketimpangan, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang data dan sumber data. Metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis data

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang Gambaran umum objek penelitian, analisis data, hasil analisis dan pembahasannya

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang perlu untuk disampaikan baik obyek penelitian ataupun bagi penelitian selanjutnya.